

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut hukum adat, perkawinan dapat merupakan urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat dan urusan pribadi. Hal ini didasarkan atas penilaian fungsi perkawinan sampai sejauh mana masyarakat, kerabat dan keluarga turut campur tangan dalam perkawinan.¹

Menurut cara bagaimana perkawinan itu dilaksanakan, maka perkawinan dalam adat istiadat masyarakat Suku Samin dikenal dalam bentuk perkawinan meminang (aanzoekhuwelijk). Inilah salah satu cara/bentuk perkawinan yang dikenal pada masyarakat tersebut.² Pada dasarnya tidak ada keharusan bagi fihak pelamar/peminang untuk membawa sesuatu sebagai hadiah dalam peminangan itu, juga tidak pula ada tatacara tertentu yang harus mengiringinya.³

Tentang cara meminang adalah dilakukan oleh fihak pemuda yang diwakili oleh orang tuanya/keluarganya/sesepuhnya pada fihak keluarga wanita (istilahnya nakokake).⁴

¹Bagian Research dan pengabdian Masyarakat, 1976. *Adat Istiadat Perkawinan Masyarakat Samin Dipedesaan Blora*, Yogyakarta:Fakultas Hukum UII, hlm 13

²*Ibid*

³*Ibid*

⁴*Ibid*

Didalam Suku Samin sendiri tidak ada batasan umur untuk melakukan perkawinan dan mereka sendiri tidak mengenal yang namanya penghitungan usia dimana menurut mereka anak yang baru lahir atau masih kanak-kanak bisa disebut dengan istilah Adam timur, setelah dikhitan disebut Adam Birahi dan sebelum kawin disebut Joko yang artinya Sajane durung tumeko. Setelah mendapat jodo disebut wis Sikep Rabi.⁵ Dan didalam masyarakat Suku Samin sendiri terdapat ketentuan bahwa perkawinan harus ijin terlebih dahulu kepada orang tua, karena orang tua lah yang nantinya akan melamar pada orang tua si gadis.

Pada dasarnya Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, memberikan definisi perkawinan sebagai berikut: *“Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang Pria dan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa “*.

Apabila definisi di atas kita telaah, maka terdapatlah lima unsur didalamnya:

- a. Ikatan lahir bathin.
- b. Antara seorang Pria seorang wanita.
- c. Sebagai suami-istri.
- d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
- e. Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.

⁵*Ibid*, hlm 15

Menurut UU No. 1/1974 hakikat perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Dari rumusan diatas jelaslah bahwa ikatan lahir dan batin harus ada dalam setiap perkawinan. Terjalannya ikatan lahir dan batin merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

Dengan demikian, bahwa hakikat perkawinan itu bukan sekedar ikatan formal belaka, tetapi juga ikatan batin. Hendaknya pasangan yang sudah resmi sebagai suami istri juga merasakan adanya ikatan batin, ini harus ada sebab tanpa itu perkawinan takakan punya arti, bahkan akan menja dirapuh. Hal inilah yang membedakan dengan hakikat perkawinan menurut KUHPdt/BW. Apabila kita membaca KUHPdt dapat diketahui bahwa hakikat perkawinan adalah merupakan hubungan hukum antara subjek-subjek yang mengikatkan diri dalam perkawinan (dalam hal ini yang dimaksud adalah antara seorang pria dan seorang wanita). Hubungan tersebut didasarkan pada persetujuan diantara mereka dan dengan adanya tujuan tersebut mereka menjadi terikat. Persetujuan yang dimaksud disini bukanlah persetujuan yang terdapat dalam buku III KUHPdt/BW, walaupun antara persetujuan dalam perkawinan dan persetujuan umumnya terdapat unsur yang sama yaitu adanya ikatan antara dua belah pihak, tetapi ada perbedaanya itu dalam bentuk hal dan isi. Asas perkawinan adalah monogami, bahwa dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya dioperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, dan seorang perempuan hanya boleh

mempunyai satu orang laki-laki sebagai suaminya. Hal ini tercantum dalam Pasal 3 UU No.1/1974 dan juga pada Pasal 27 KUHPdt/BW.⁶

Dengan adanya asas monogamy serta tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka suatu tindakan yang akan mengakibatkan putusnya suatu perkawinan (dalam hal ini yang dimaksud adalah perceraian) harus benar-benar dipikirkan serta dipertimbangkan masak-masak. Sebab jika itu terjadi maka akan membawa akibat yang luas, tidak hanya menyangkut diri suami atau istri tetapi nasib anak-anak juga harus diperhatikan. Dengan demikian diharapkan pula agar tidak begitu mudah melangsungkan perkawinan serta begitu mudah bercerai (kawin-cerai berulang-ulang).⁷

Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan dalam latarbelakang masalah tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“STUDI KASUS TENTANG ADAT-ISTIADAT PERKAWINAN SUKU SAMIN DITINJAU DARI UU No. 1 TAHUN 1974”**.

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dimaksudkan untuk menegaskan masalah-masalah yang diteliti sehingga memudahkan untuk melakukan pembahasan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁶Suhardana, F.X., 2005, *HukumPerdata I*, Jakarta, PT GramediaPustakaUtama, Hal. 35.

⁷Prof.R. Subektidan R. Tjitrosudibio,*KitabUndang-UndangHukumPerdata*.Jakarta, PT. Pradnya Paramita,2007, Hal. 50.

1. Bagaimana proses perkawinan Suku samin?
2. Apakah perkawinan Suku Samin sah menurut UU No 1 Tahun 1974?
3. Bagaimana akibat hukum perkawinan Suku Samin bagipara pihak?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian agar terarah dan mengenai sasaran, maka harus mempunyai tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Objektif.
 - a. Untuk mengetahui proses perkawinan Suku Samin.
 - b. Untuk mengetahui apakah perkawinan Suku Samin sah menurut UU No 1 Tahun 1974.
 - c. Untuk memperoleh pengetahuan akibat dari perkawinan Suku Samin bagipara pihak.
2. Tujuan Subjektif
 - a. Untuk menambah wawasan pengetahuan serta pemahaman penulis terhadap proses pelaksanaan perkawinan Suku Samin.
 - b. Memperdalam pengetahuan tentang sahnya perkawinan Suku Samin.
 - c. Untuk memperoleh data-data informasi tentang akibat perkawinan Suku Samin.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat diharapkan dan diambil oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Berguna sebagai sarana bagi penulis untuk memperluas wawasan dan pengetahuan terutama di bidang Hukum perdata.
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai proses perkawinan, sahnya perkawinan Suku Samin menurut UU No. 1 Tahun 1974, dan akibat dari perkawinan Suku Samin.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak masyarakat secara umum, maupun pemerintah khususnya di wilayah hukum Kota Surakarta.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca atau masyarakat serta dapat membantu memecahkan masalah yang mungkin sedang dihadapi oleh masyarakat kalau terjadi sengketa tentang perkawinan Suku Samin.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan keilmuan bagi penulis, khususnya mengenai proses pelaksanaan perkawinan Suku Samin, sahnya perkawinan Suku Samin menurut hukum perdata, akibat perkawinan Suku Samin menurut hukum perdata.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas, tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu mengenai adat-istiadat suku Samin.

2. Metode Pendekatan

Penelitian skripsi ini, penulis mendasarkan pada penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan.⁸ Penulis akan berusaha mengungkapkan adat istiadat perkawinan suku Samin dilihat dari UU No. 1 Tahun 1974.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara *purposive*, yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan, yaitu:

- a. Desa tersebut banyak (ada) didiami oleh pengikut-pengikut ajaran Samin.

⁸Soerjono soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo..halaman 26.

- b. Orang-orang Samin di desa tersebut masih mencerminkan sikap orisinil ajaran Samin (sedikit banyaknya).
- c. Di desa tersebut terdapat responden yang dapat memberikan informasi yang menerangkan tentang obyek penelitian, baik dari orang-orang Samin sendiri ataupun bukan.
- d. Desa tersebut masih dalam jangkuan kemampuan untuk diteliti.

4. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dua sumber yang berbeda yaitu:

a. Data Sekunder

Yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, baik yang meliputi:

- 1. Dokumen-dokumen tertulis, artikel ilmiah, buku-buku literatur, dokumen-dokumen resmi, arsip dan publikasi dari lembaga-lembaga yang terkait.
- 2. Dokumen-dokumen yang bersumber dari data-data statistik, baik yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, maupun oleh Universitas yang terkait dengan fokus permasalahannya.

b. Data Primer

Yaitu data-data yang berupa keterangan-keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek

yang diteliti, yang dimaksudkan untuk dapat lebih memahami maksud dan arti data sekunder yang ada.

5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian deskriptif ini agar dapat membahas dan mendalami masalah yang ada maka penulis melakukan pengumpulan data dengan cara sebagai berikut;

1) Studi Kepustakaan

Yaitu pengumpulan bahan-bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literature dan bahan kepustakaan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan pengetahuan secara teoritis.

2) Studi Lapangan

a. Observasi atau pengamatan di lapangan.

Observasi merupakan suatu proses pengamatan peristiwa-peristiwa empiris di masyarakat . Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.⁹

b. Interview atau wawancara

Wawancara dilakukan kepada siapa sebagai informan kunci kemudian dalam melakukan wawancara dijelaskan secara garis besa

⁹SutrisnoHadi, 1986, *Metodologi Research*, UniversitasGadjahMada, Yogyakarta.

mengetahui proses perkawinan suku Samin, apakah perkawinan Suku Samin sah menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan mengetahui akibat hukum bagi perkawinan Suku Samin bagi para pihak..

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk penelitian dengan cara tanya jawab sambil menatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara) wawancara sebagai proses interaksi interview antara pewawancara dan responden.¹⁰

6. Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa kualitatif, yaitu mengambil kesimpulan dari pendapat para ahli/responden dikaitkan dengan kajian-kajian secara ilmiah, karena data yang penulis kumpulkan berwujud kasus-kasus. Dalam analisis kualitatif tersebut, penulis menggunakan model analisa interatif. Dengan model tersebut data akan di program melalui tiga komponen yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Aktifitasnya dilakukan dengan melakukan proses siklus antara komponen-komponen tersebut, sehingga akan didapat data yang benar-benar mewakili dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.¹¹

¹⁰ Affila, Oktober 2011, dalam <http://definisi-pengertian.blogspot.com>, download 27 Oktober 2011 15.30 WIB

¹¹ H.B Soetopo, 2002, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press, Hal. 94-96.

F. Sistematika Penulisan skripsi

Sistematika penulisan skripsi memberikan gambaran dan mengemukakan garis besar skripsi agar memudahkan dalam mempelajari seluruh isinya. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah dan ruang lingkup skripsi ini, maka disajikan sistematika skripsi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Perkawinan Menurut Hukum Adat
 - 1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat
 - 2. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Adat
 - 3. Asas-Asas Perkawinan Menurut Hukum adat
 - 4. Syarat-syarat Perkawinan Menurut Hukum Adat
 - 5. Bentuk-bentuk Perkawinan Menurut Hukum Adat
 - 6. Perempuan Yang Boleh Dinikahi Menurut Hukum Adat
 - 7. Macam-macam Sistem Perkawinan Menurut Hukum Adat
-

B. Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan (UUP)

1. Pengertian Perkawinan Menurut UUP
2. Tujuan Perkawinan Menurut UUP
3. Syarat Perkawinan Menurut UUP
4. Asas-Asas Perkawinan Menurut UUP
5. Pencatatan Perkawinan Menurut UUP
6. Akibat Hukum dari Perkawinan Menurut UUP

C. Gambaran Masyarakat Samin dan Hukum Adat Yang Berlaku

1. Sejarah Masyarakat Samin
2. Hukum Adat yang Berlaku Pada Masyarakat Samin

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Perkawinan Adat Masyarakat Samin

1. Proses Meminang
2. Nyuwita atau *Ngenger*
3. Tamu yang menghadiri pernikahan
4. Tata cara pernikahan
5. Ijab-Kabul
6. Pencatatan perkawinan

B. Sahnya Perkawinan Adat Samin Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan

1. Makna dan tujuan Perkawinan
 2. Syarat-syarat perkawinan
 3. Tata Cara perkawinan
 4. Pencatatan perkawinan
- C. Akibat Hukum Perkawinan Adat Samin bagi Para Pihak

BAB 1V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN